



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN

NOMOR : 06/Pansel-PPPK/MA/XII/2022

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TENAGA TEKNIS
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 342 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022, Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis Mahkamah Agung RI.

I. UNIT KERJA YANG MENDAPATKAN PENETAPAN KEBUTUHAN

Penetapan Kebutuhan PPPK Tenaga Teknis di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia sejumlah 921 (sembilan ratus dua puluh satu) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

II. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JUMLAH PENETAPAN KEBUTUHAN

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Penetapan Kebutuhan
1	Ahli Pertama - Widyaiswara	S-2 Administrasi S-2 Hukum S-2 Manajemen SDM S-2 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan	4
2	Ahli Pertama - Perencana	S-1 Ekonomi Pembangunan S-1 Akuntansi S-1 Manajemen S-1 Manajemen Dan Kebijakan Publik S-1 Administrasi Negara S-1 Administrasi Publik S-1 Administrasi Niaga S-1 Administrasi Fiskal S-1 Ilmu Pemerintahan S-1 Perencanaan Wilayah Kota	67

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Penetapan Kebutuhan
3	Ahli Pertama - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	S-1 Manajemen S-1 Akuntansi S-1 Ekonomi Pembangunan S-1 Ekonomi Islam S-1 Ekonomi Syariah S-1 Psikologi S-1 Hukum S-1 Teknik Sipil S-1 Teknik Lingkungan S-1 Teknik Mesin S-1 Teknik Informatika S-1 Teknik Elektro S-1 Ilmu Politik S-1 Ilmu Pemerintahan S-1 Manajemen Dan Kebijakan Publik S-1 Hubungan Internasional S-1 Sosiologi S-1 Kriminologi S-1 Kesejahteraan Sosial S-1 Komunikasi S-1 Administrasi Niaga S-1 Administrasi Fiskal S-1 Matematika S-1 Fisika S-1 Kimia S-1 Biologi S-1 Statistika S-1 Geofisika	64
4	Ahli Pertama - Pengembang Teknologi Pembelajaran	S-1 Pendidikan S-1 Komputer S-1 Teknologi Informasi S-1 Media Dan Komunikasi S-1 Komunikasi S-1 Teknologi Pendidikan S-1 Kurikulum & Teknologi Pendidikan	1
5	Ahli Pertama - Arsiparis	S-1 Administrasi Negara S-1 Ilmu Pemerintahan S-1 Kearsipan S-1 Administrasi Publik S-1 Manajemen S-1 Manajemen Dan Kebijakan Publik S-1 Ilmu Informasi Dan Perpustakaan	58
6	Ahli Pertama - Pranata Komputer	S-1 Teknik Informatika S-1 Teknologi Informasi S-1 Sistem Informasi S-1 Ilmu Komputer	8
7	Terampil - Arsiparis	D-III Kearsipan D-III Administrasi Bisnis D-III Administrasi Publik D-III Administrasi Kearsipan D-III Administrasi Negara D-III Perpustakaan D-III Kearsipan Digital	719
Jumlah Penetapan Kebutuhan			921

III. PERSYARATAN

A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat mendaftar;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari Lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan Badan Peradilan yang berada di bawahnya di seluruh Indonesia;
11. Berkelakuan baik dan tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
12. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (skala 4,00);
13. Bagi Pelamar lulusan Perguruan Tinggi yang berasal dari Luar Negeri harus telah mendapatkan penetapan penyetaraan ijazah luar negeri dan penetapan penyetaraan transkrip nilai dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) skala 4,00.
14. Surat Keterangan Kelulusan/Ijazah Sementara tidak dapat diterima;
15. Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar dibuktikan dengan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh:
 - a. Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada instansi pemerintah; dan
 - b. Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.

B. Persyaratan Khusus

1. Pelamar Ahli Pertama - Widyaiswara, wajib memiliki sertifikasi dalam bidang pelatihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) pada:
 - a. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Metodologi Pelatihan Jenjang 3; dan
 - b. Perancangan Program dan Media Pelatihan.
2. Pelamar Ahli Pertama - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa tingkat dasar/level-1 yang

diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

3. Pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dan melampirkan:
 - a. Dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
 - b. Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

IV. TAMBAHAN NILAI

Pelamar penyandang disabilitas mendapatkan nilai tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis.

V. TATA CARA PENDAFTARAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN

A. Tata Cara Pendaftaran

1. Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 21 Desember 2022 dan ditutup pada tanggal 6 Januari 2023 dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) peserta dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di Kartu Keluarga pelamar;
2. Setelah melakukan pendaftaran pelamar kembali *login* ke portal <https://sscasn.bkn.go.id> menggunakan akun yang telah didaftarkan dan memilih instansi Mahkamah Agung, jenis penetapan kebutuhan serta jabatan sesuai pendidikan serta melengkapi data dan *form* yang tersedia;
3. Surat Lamaran dan Surat Pernyataan dibubuhkan meterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Apabila telah menyelesaikan seluruh tahapan pendaftaran, pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran.

B. Dokumen Persyaratan Pelamar

Pelamar wajib mengunggah persyaratan *scan* dokumen asli dan berwarna (tidak hitam putih) pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> serta memastikan seluruh dokumen yang diunggah dapat dibuka (file tidak rusak dan terbaca dengan jelas) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat lamaran ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI diketik menggunakan Komputer dan ditandatangani di atas meterai Rp10.000,- (format surat lamaran sebagaimana Lampiran II);
2. Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)/ Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP;
3. Dokumen kelulusan pendidikan digabungkan dalam satu file dengan format *pdf*, yang terdiri dari:
 - a. Ijazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 - b. Surat keputusan penyetaraan ijazah asli dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri.
4. Transkrip nilai asli dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) skala 4,00;
5. Surat pernyataan ditandatangani di atas meterai Rp10.000,- (format surat pernyataan sebagaimana Lampiran III);

6. Pas Foto (mengenakan kemeja warna putih, latar belakang warna merah, format *file jpeg*);
7. Surat Keterangan pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai persyaratan;
8. Bagi pelamar:
 - a. Ahli Pertama - Widyaiswara melampirkan sertifikat dalam bidang pelatihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) pada:
 - 1) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Metodologi Pelatihan Jenjang 3; dan
 - 2) Perancangan Program dan Media Pelatihan.
 - b. Ahli Pertama - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa melampirkan Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa tingkat dasar/level-1 yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
9. Bagi pelamar penyandang disabilitas, melampirkan:
 - a. Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan tingkat kedisabilitasnya; dan
 - b. Wajib membuat video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar (berjalan, mengetik menggunakan komputer, berkomunikasi dengan orang lain, dan lain-lin) dengan durasi waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) menit dan menginput *link video* tersebut pada portal <https://sscasn.bkn.go.id> serta memastikan *link* dapat diakses oleh panitia seleksi.

VI. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi
 - a. Merupakan proses verifikasi data yang diinput dan dokumen yang diunggah pelamar berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian dengan persyaratan pendaftaran yang telah ditetapkan pada Pengumuman ini.
 - b. Dalam hal dokumen lamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
 - c. Bagi pelamar jabatan Ahli Pertama - Widyaiswara, Ahli Pertama - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dan pelamar penyandang disabilitas yang tidak melampirkan persyaratan khusus maka dinyatakan tidak melengkapi berkas seleksi administrasi dan dinyatakan gugur.
2. Seleksi Kompetensi
 - a. Pelamar yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi dan Wawancara adalah pelamar yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi dan memenuhi ketentuan/persyaratan lain yang ditentukan;
 - b. Materi Seleksi Kompetensi dan Wawancara menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* terdiri dari:
 - 1) Tes Kompetensi Teknis;
 - 2) Tes Kompetensi Manajerial;
 - 3) Tes Sosial Kultural; dan
 - 4) Wawancara (Integritas dan Moralitas).
 - c. Kriteria kelulusan seleksi kompetensi ditentukan berdasarkan nilai ambang batas yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional;
 - d. Nilai kumulatif Kompetensi teknis tidak lebih dari 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis;
 - e. Pelamar dapat memilih lokasi pelaksanaan seleksi kompetensi sebagaimana tercantum pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

VII. MASA SANGGAH

1. Masa Sanggah Seleksi Administrasi
 - a. Waktu yang diberikan untuk pelamar mengajukan sanggahan terhadap pengumuman Seleksi Administrasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
 - b. Alasan sanggah dapat diterima dalam hal kesalahan bukan dari pelamar. Jika alasan sanggah diterima, maka pengumuman ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
2. Masa Sanggah Hasil Akhir Seleksi
 - a. Waktu yang diberikan untuk pelamar mengajukan sanggahan terhadap hasil seleksi akhir paling lambat 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi akhir diumumkan;
 - b. Waktu tanggapan sanggah dan pengumuman ulang hasil akhir seleksi yang dilakukan oleh instansi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

VIII. JADWAL SELEKSI PPPK TENAGA TEKNIS

Jadwal seleksi sebagaimana Surat Plt. Kepala BKN Nomor 43066/B-KS.04.01/SD/K/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Teknis Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Uraian	Waktu Pelaksanaan
TAHAPAN PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN		
1.	Pengumuman Seleksi	20 Desember 2022 s.d. 3 Januari 2023
2.	Pendaftaran Seleksi	21 Desember 2022 s.d. 6 Januari 2023
TAHAPAN SELEKSI ADMINISTRASI		
3.	Seleksi Administrasi	21 Desember 2022 s.d. 11 Januari 2023
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	12 s.d. 15 Januari 2023
5.	Masa Sanggah	16 s.d. 18 Januari 2023
6.	Jawab Sanggah	19 s.d. 25 Januari 2023
7.	Pengumuman Pasca Sanggah	26 s.d. 28 Januari 2023
8.	Pemilihan Titik Lokasi Ujian dan Pencetakan Kartu Peserta	18 s.d. 22 Februari 2023
TAHAPAN SELEKSI KOMPETENSI		
9.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	10 Maret s.d. 3 April 2023
TAHAPAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PPPK		
10.	Pengumuman kelulusan	9 s.d. 11 April 2023
11.	Masa Sanggah	12 s.d. 14 April 2023
12.	Jawab Sanggah	14 s.d. 20 April 2023
13.	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	27 s.d. 29 April 2023

Catatan:

1. Jadwal di atas dimungkinkan mengalami perubahan, dan setiap perubahan akan diumumkan melalui *website* <https://mahkamahagung.go.id>, <https://rekrutmen.mahkamahagung.go.id> dan <https://sscASN.bkn.go.id>
2. Jadwal dapat disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah.
3. Peserta wajib memantau informasi jadwal di *website* tersebut.

IX. MASA HUBUNGAN KERJA

Masa Hubungan Perjanjian Kerja PPPK dengan Pejabat Pembina Kepegawaian Mahkamah Agung ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dengan evaluasi kinerja setiap 1 (satu) tahun.

X. LAIN-LAIN

1. Pelamar harus membaca pengumuman dengan cermat, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman;
2. Pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu penetapan kebutuhan jabatan;
3. Kelulusan pelamar adalah prestasi pelamar sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindak pidana. Kepada para pelamar, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan barang/sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi PPPK Mahkamah Agung RI, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
4. Bagi pelamar yang tidak hadir, terlambat, tidak mengikuti tahapan seleksi atau tidak dapat menunjukkan kartu peserta ujian dan e-KTP atau surat keterangan perekaman kependudukan dengan alasan apapun, pada waktu dan tempat yang ditetapkan dalam pelaksanaan seleksi, maka dinyatakan gugur;
5. Apabila dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan/data pelamar tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau berlawanan dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani ternyata tidak benar, maka panitia seleksi berhak menggugurkan kelulusan pelamar yang bersangkutan;
6. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima, kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengganti dengan pelamar yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil kelulusan setelah mendapatkan persetujuan Panselnas;
7. Dalam hal pelamar yang dinyatakan lulus tahap akhir dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK tetapi mengajukan pengunduran diri atau tidak melapor pada satuan kerja sesuai Keputusan Pengangkatan PPPK dianggap mengundurkan diri dan kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak dapat mendaftar pada penerimaan ASN 1 (satu) periode berikutnya dan membayar ganti rugi sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
8. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
9. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat;
10. Seluruh data/dokumen pelaksanaan seleksi yang diberikan oleh pelamar menjadi milik panitia;
11. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di portal <https://sscASN.bkn.go.id>, laman <https://mahkamahagung.go.id> dan <https://rekrutmen.mahkamahagung.go.id>;

12. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2022 dapat menghubungi *helpdesk* melalui:
- a) Telepon : +62 877-7711-3510 pada hari kerja pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB;
 - b) *e-mail* : rekrutmen.casn@mahkamahagung.go.id;
 - c) *WhatsApp* : +62 877-7719-5103 pada hari kerja pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB;
 - d) Telegram : CASN MAHKAMAH AGUNG;
 - e) *Facebook* : Rekrutmen CASN Mahkamah Agung;
 - f) *Twitter* : @CASN_MA_RI;
 - g) *Instagram* : rekrutmencasn.mahkamahagung;
13. Pelayanan dan penjelasan terkait sistem SSCASN, dapat menghubungi menu *helpdesk* pada <https://sscasn.bkn.go.id>.
14. Segala bentuk pengaduan terhadap tindakan penyimpangan pada pelaksanaan seleksi PPPK Tenaga Teknis Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2022 dapat disampaikan melalui **Whistleblowing System** Mahkamah Agung RI, dengan alamat <https://siwas.mahkamahagung.go.id>.
15. Seluruh kegiatan seleksi PPPK Tenaga Teknis Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2022 akan disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah.

Jakarta, 20 Desember 2022
Sekretaris Mahkamah Agung RI
Selaku Ketua Panitia Pelaksana Seleksi,



Prof. Dr. H. Hasbi, S.H., M.H.

NO	JABATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER JABATAN	PENEMPATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER UNIT KERJA
1	2	3	5	4
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA TERNATE	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA	1
			PENGADILAN TINGGI AMBON	1
			PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	1
			PENGADILAN TINGGI BANDUNG	1
			PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	1
			PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN	1
			PENGADILAN TINGGI BANTEN	1
			PENGADILAN TINGGI BENGKULU	1
			PENGADILAN TINGGI DENPASAR	1
			PENGADILAN TINGGI GORONTALO	1
			PENGADILAN TINGGI JAKARTA	1
			PENGADILAN TINGGI JAMBI	1
			PENGADILAN TINGGI JAYAPURA	1
			PENGADILAN TINGGI KENDARI	1
			PENGADILAN TINGGI KUPANG	1
			PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	1
			PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	1
			PENGADILAN TINGGI MATARAM	1
			PENGADILAN TINGGI MEDAN	1
			PENGADILAN TINGGI PADANG	1
			PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	1
			PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	1
			PENGADILAN TINGGI PALU	1
			PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	1
			PENGADILAN TINGGI SAMARINDA	1
			PENGADILAN TINGGI SEMARANG	1
			PENGADILAN TINGGI TANJUNGPUR	1
			PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA	1
			PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR	1
			PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN	1
			PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA	1
			PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA	1
4	AHLI PERTAMA - PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN	1	BADAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN	1
5	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	58	BADAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN	1
			DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	1
			MAHKAMAH SYARIAH ACEH	1
			PENGADILAN MILITER UTAMA	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA TERNATE	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA	1
			PENGADILAN TINGGI AMBON	1
			PENGADILAN TINGGI BANDUNG	1
			PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	1
			PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN	1

NO	JABATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER JABATAN	PENEMPATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER UNIT KERJA
1	2	3	5	4
			PENGADILAN TINGGI BANTEN	1
			PENGADILAN TINGGI BENGKULU	1
			PENGADILAN TINGGI DENPASAR	1
			PENGADILAN TINGGI GORONTALO	1
			PENGADILAN TINGGI JAKARTA	1
			PENGADILAN TINGGI JAMBI	1
			PENGADILAN TINGGI JAYAPURA	1
			PENGADILAN TINGGI KENDARI	1
			PENGADILAN TINGGI KUPANG	1
			PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	1
			PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	1
			PENGADILAN TINGGI MANADO	1
			PENGADILAN TINGGI MATARAM	1
			PENGADILAN TINGGI MEDAN	1
			PENGADILAN TINGGI PADANG	1
			PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	1
			PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	1
			PENGADILAN TINGGI PALU	1
			PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	1
			PENGADILAN TINGGI RIAU	1
			PENGADILAN TINGGI SAMARINDA	1
			PENGADILAN TINGGI SEMARANG	1
			PENGADILAN TINGGI SURABAYA	1
			PENGADILAN TINGGI TANJUNGPURA	1
			PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA	1
6	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	8	BADAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN	1
			BADAN PENGAWASAN	1
			BADAN URUSAN ADMINISTRASI	3
			DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA	1
			DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA	1
			DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	1
7	TERAMPIL - ARSIPARIS	719	BADAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN	1
			BADAN PENGAWASAN	1
			BADAN URUSAN ADMINISTRASI	3
			DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA	1
			DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA	1
			DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	1
			KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI	1
			MAHKAMAH SYAR'YAH BLANGPIDIE	1
			MAHKAMAH SYAR'YAH KOTA SUBULUSSALAM	1
			MAHKAMAH SYAR'YAH SUKA MAKMUE	1
			MAHKAMAH SYARIAH BANDA ACEH	1
			MAHKAMAH SYARIAH BIEREUN	1
			MAHKAMAH SYARIAH KUALA SIMPANG	1
			MAHKAMAH SYARIAH LHOK SEUMAWE	1
			MAHKAMAH SYARIAH SIGLI	1
			MAHKAMAH SYARIAH TAKENGON	1
			PENGADILAN AGAMA AMBARAWA	1
			PENGADILAN AGAMA AMBON	1
			PENGADILAN AGAMA AMPANA	1
			PENGADILAN AGAMA AMUNTAI	1
			PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR	1
			PENGADILAN AGAMA ARSO	1
			PENGADILAN AGAMA ATAMBUA	1
			PENGADILAN AGAMA BADUNG	1
			PENGADILAN AGAMA BAJAWA	1
			PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN	1
			PENGADILAN AGAMA BANDUNG	1
			PENGADILAN AGAMA BANGIL	1
			PENGADILAN AGAMA BANGKALAN	1
			PENGADILAN AGAMA BANGKINANG	1
			PENGADILAN AGAMA BANGKO	1
			PENGADILAN AGAMA BANGLI	1
			PENGADILAN AGAMA BANJAR	1
			PENGADILAN AGAMA BANJAR BARU	1
			PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN	1
			PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA	1
			PENGADILAN AGAMA BANTUL	1
			PENGADILAN AGAMA BANYUMAS	1
			PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI	1
			PENGADILAN AGAMA BARABAI	1
			PENGADILAN AGAMA BATAM	1
			PENGADILAN AGAMA BATANG	1
			PENGADILAN AGAMA BATURAJA	1
			PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR	1
			PENGADILAN AGAMA BAWEAN	1
			PENGADILAN AGAMA BEKASI	1
			PENGADILAN AGAMA BELOPA	1
			PENGADILAN AGAMA BENGKULU	1
			PENGADILAN AGAMA BIMA	1
			PENGADILAN AGAMA BINJAI	1
			PENGADILAN AGAMA BINTUHAN	1

NO	JABATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER JABATAN	PENEMPATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER UNIT KERJA
1	2	3	5	4
			PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU	1
			PENGADILAN AGAMA BLITAR	1
			PENGADILAN AGAMA BLORA	1
			PENGADILAN AGAMA BOGOR	1
			PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO	1
			PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI	1
			PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO	1
			PENGADILAN AGAMA BOROKO	1
			PENGADILAN AGAMA BOYOLALI	1
			PENGADILAN AGAMA BREBES	1
			PENGADILAN AGAMA BUKIT TINGGI	1
			PENGADILAN AGAMA BUNGKU	1
			PENGADILAN AGAMA CIAMIS	1
			PENGADILAN AGAMA CIANJUR	1
			PENGADILAN AGAMA CIBADAK	1
			PENGADILAN AGAMA CIBINONG	1
			PENGADILAN AGAMA CIKARANG	1
			PENGADILAN AGAMA CILACAP	1
			PENGADILAN AGAMA CILEGON	1
			PENGADILAN AGAMA CIREBON	1
			PENGADILAN AGAMA CURUP	1
			PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIMOA	1
			PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOP	1
			PENGADILAN AGAMA DEMAK	1
			PENGADILAN AGAMA DENPASAR	1
			PENGADILAN AGAMA DEPOK	1
			PENGADILAN AGAMA DOMPU	1
			PENGADILAN AGAMA DONGGALA	1
			PENGADILAN AGAMA DUMAI	1
			PENGADILAN AGAMA ENDE	1
			PENGADILAN AGAMA GARUT	1
			PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN	1
			PENGADILAN AGAMA GIANJAR	1
			PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG	1
			PENGADILAN AGAMA GORONTALO	1
			PENGADILAN AGAMA GRESIK	1
			PENGADILAN AGAMA GUNUNG SITOLI	1
			PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH	1
			PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU	1
			PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT	1
			PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT	1
			PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN	1
			PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR	1
			PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA	1
			PENGADILAN AGAMA JAMBI	1
			PENGADILAN AGAMA JAYAPURA	1
			PENGADILAN AGAMA JEMBER	1
			PENGADILAN AGAMA JEPARA	1
			PENGADILAN AGAMA JOMBANG	1
			PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI	1
			PENGADILAN AGAMA KAB. MADIUN	1
			PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG	1
			PENGADILAN AGAMA KABANJAHE	1
			PENGADILAN AGAMA KAIMANA	1
			PENGADILAN AGAMA KAJEN	1
			PENGADILAN AGAMA KALABAH	1
			PENGADILAN AGAMA KALIANDA	1
			PENGADILAN AGAMA KANGEAN	1
			PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR	1
			PENGADILAN AGAMA KARANGASEM	1
			PENGADILAN AGAMA KARAWANG	1
			PENGADILAN AGAMA KASONGAN	1
			PENGADILAN AGAMA KAYU AGUNG	1
			PENGADILAN AGAMA KEBUMEN	1
			PENGADILAN AGAMA KEFAMENANU	1
			PENGADILAN AGAMA KENDAL	1
			PENGADILAN AGAMA KENDARI	1
			PENGADILAN AGAMA KEPAHANG	1
			PENGADILAN AGAMA KISARAN	1
			PENGADILAN AGAMA KLATEN	1
			PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG	1
			PENGADILAN AGAMA KOTA BUMI	1
			PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI	1
			PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI	1
			PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN	1
			PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG	1
			PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA	1
			PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU	1
			PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN	1
			PENGADILAN AGAMA KRUI	1
			PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN	1
			PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG	1
			PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL	1
			PENGADILAN AGAMA KUDUS	1
			PENGADILAN AGAMA KUNINGAN	1
			PENGADILAN AGAMA KUPANG	1
			PENGADILAN AGAMA KWANDANG	1

NO	JABATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER JABATAN	PENEMPATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER UNIT KERJA
1	2	3	5	4
			PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO	1
			PENGADILAN AGAMA LABUHA	1
			PENGADILAN AGAMA LAHAT	1
			PENGADILAN AGAMA LAMONGAN	1
			PENGADILAN AGAMA LARANTUKA	1
			PENGADILAN AGAMA LASUSUA	1
			PENGADILAN AGAMA LEBONG	1
			PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA	1
			PENGADILAN AGAMA LIMBOTO	1
			PENGADILAN AGAMA LOLAK	1
			PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU	1
			PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM	1
			PENGADILAN AGAMA LUMAJANG	1
			PENGADILAN AGAMA LUWUK	1
			PENGADILAN AGAMA MAGELANG	1
			PENGADILAN AGAMA MAGETAN	1
			PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA	1
			PENGADILAN AGAMA MAKASSAR	1
			PENGADILAN AGAMA MALILI	1
			PENGADILAN AGAMA MAMUJU	1
			PENGADILAN AGAMA MANADO	1
			PENGADILAN AGAMA MANNA	1
			PENGADILAN AGAMA MANOKWARI	1
			PENGADILAN AGAMA MARISA	1
			PENGADILAN AGAMA MAROS	1
			PENGADILAN AGAMA MARTAPURA	1
			PENGADILAN AGAMA MASOHI	1
			PENGADILAN AGAMA MATARAM	1
			PENGADILAN AGAMA MAUMERE	1
			PENGADILAN AGAMA MEDAN	1
			PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH	1
			PENGADILAN AGAMA MENTOK	1
			PENGADILAN AGAMA MERAUKE	1
			PENGADILAN AGAMA MESUJI	1
			PENGADILAN AGAMA METRO	1
			PENGADILAN AGAMA MIMIKA	1
			PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO	1
			PENGADILAN AGAMA MOROTAI	1
			PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN	1
			PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM	1
			PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK	1
			PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO	1
			PENGADILAN AGAMA MUARADUA	1
			PENGADILAN AGAMA MUARO BUNGO	1
			PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO	1
			PENGADILAN AGAMA MUNGKID	1
			PENGADILAN AGAMA NAMLEA	1
			PENGADILAN AGAMA NANGA BULIK	1
			PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH	1
			PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH	1
			PENGADILAN AGAMA NGANJUK	1
			PENGADILAN AGAMA NGAWI	1
			PENGADILAN AGAMA PACITAN	1
			PENGADILAN AGAMA PADANG	1
			PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM	1
			PENGADILAN AGAMA PAINAI	1
			PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA	1
			PENGADILAN AGAMA PALEMBANG	1
			PENGADILAN AGAMA PALU	1
			PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN	1
			PENGADILAN AGAMA PANDAN	1
			PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG	1
			PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG	1
			PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI	1
			PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN	1
			PENGADILAN AGAMA PARE-PARE	1
			PENGADILAN AGAMA PARIAMAN	1
			PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU	1
			PENGADILAN AGAMA PASARWAJO	1
			PENGADILAN AGAMA PASURUAN	1
			PENGADILAN AGAMA PATI	1
			PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH	1
			PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN	1
			PENGADILAN AGAMA PEKANBARU	1
			PENGADILAN AGAMA PELAIHARI	1
			PENGADILAN AGAMA PEMALANG	1
			PENGADILAN AGAMA PEMATANG SIANTAR	1
			PENGADILAN AGAMA PENAJAM	1
			PENGADILAN AGAMA PINRANG	1
			PENGADILAN AGAMA POLEWALI	1
			PENGADILAN AGAMA PONOROGO	1
			PENGADILAN AGAMA PONTIANAK	1
			PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	1
			PENGADILAN AGAMA PRAYA	1
			PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU	1
			PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO	1
			PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU	1

NO	JABATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER JABATAN	PENEMPATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER UNIT KERJA
1	2	3	5	4
			PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA	1
			PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA	1
			PENGADILAN AGAMA PURWODADI	1
			PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO	1
			PENGADILAN AGAMA PURWOREJO	1
			PENGADILAN AGAMA PUTUSIBAU	1
			PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG	1
			PENGADILAN AGAMA RANTAU	1
			PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT	1
			PENGADILAN AGAMA REMBANG	1
			PENGADILAN AGAMA RENGAT	1
			PENGADILAN AGAMA RUMBIA	1
			PENGADILAN AGAMA RUTENG	1
			PENGADILAN AGAMA SALATIGA	1
			PENGADILAN AGAMA SAMARINDA	1
			PENGADILAN AGAMA SAMBAS	1
			PENGADILAN AGAMA SAMPANG	1
			PENGADILAN AGAMA SAMPIT	1
			PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN	1
			PENGADILAN AGAMA SEKAYU	1
			PENGADILAN AGAMA SELONG	1
			PENGADILAN AGAMA SEMARANG	1
			PENGADILAN AGAMA SENDAWAR	1
			PENGADILAN AGAMA SENGETI	1
			PENGADILAN AGAMA SENGKANG	1
			PENGADILAN AGAMA SENTANI	1
			PENGADILAN AGAMA SERANG	1
			PENGADILAN AGAMA SERUI	1
			PENGADILAN AGAMA SIBOLGA	1
			PENGADILAN AGAMA SIDIKALANG	1
			PENGADILAN AGAMA SIDOARJO	1
			PENGADILAN AGAMA SINGARAJA	1
			PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG	1
			PENGADILAN AGAMA SITUBONDO	1
			PENGADILAN AGAMA SLAWI	1
			PENGADILAN AGAMA SLEMAN	1
			PENGADILAN AGAMA SO'E	1
			PENGADILAN AGAMA SOA SIO	1
			PENGADILAN AGAMA SOREANG	1
			PENGADILAN AGAMA SORONG	1
			PENGADILAN AGAMA SRAGEN	1
			PENGADILAN AGAMA STABAT	1
			PENGADILAN AGAMA SUBANG	1
			PENGADILAN AGAMA SUKABUMI	1
			PENGADILAN AGAMA SUKADANA	1
			PENGADILAN AGAMA SUKAMARA	1
			PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO	1
			PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR	1
			PENGADILAN AGAMA SUMBER	1
			PENGADILAN AGAMA SUMEDANG	1
			PENGADILAN AGAMA SUMENEP	1
			PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH	1
			PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA	1
			PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT	1
			PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA	1
			PENGADILAN AGAMA SURABAYA	1
			PENGADILAN AGAMA SURAKARTA	1
			PENGADILAN AGAMA SUWAWA	1
			PENGADILAN AGAMA TABANAN	1
			PENGADILAN AGAMA TAIS	1
			PENGADILAN AGAMA TAKALAR	1
			PENGADILAN AGAMA TALIWANG	1
			PENGADILAN AGAMA TAMIYANG LAYANG	1
			PENGADILAN AGAMA TANGERANG	1
			PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS	1
			PENGADILAN AGAMA TANJUNG	1
			PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI	1
			PENGADILAN AGAMA TANJUNG PANDAN	1
			PENGADILAN AGAMA TANJUNG PINANG	1
			PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR	1
			PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG	1
			PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG	1
			PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG	1
			PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA	1
			PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI	1
			PENGADILAN AGAMA TEGAL	1
			PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG	1
			PENGADILAN AGAMA TENGGARONG	1
			PENGADILAN AGAMA TERNATE	1
			PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA	1
			PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK	1
			PENGADILAN AGAMA TUAL	1
			PENGADILAN AGAMA TUBAN	1
			PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG	1
			PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH	1
			PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG	1
			PENGADILAN AGAMA TUTUYAN	1
			PENGADILAN AGAMA WAIKABUBAK	1
			PENGADILAN AGAMA WAINGAPU	1

NO	JABATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER JABATAN	PENEMPATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER UNIT KERJA
1	2	3	5	4
			PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI	1
			PENGADILAN AGAMA WATAMPONE	1
			PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG	1
			PENGADILAN AGAMA WATES	1
			PENGADILAN AGAMA WONOGIRI	1
			PENGADILAN AGAMA WONOSARI	1
			PENGADILAN AGAMA WONOSOBO	1
			PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	1
			PENGADILAN MILITER I - 01 BANDA ACEH	1
			PENGADILAN MILITER I - 02 MEDAN	1
			PENGADILAN MILITER I - 03 PADANG	1
			PENGADILAN MILITER I - 04 PALEMBANG	1
			PENGADILAN MILITER I - 05 PONTIANAK	1
			PENGADILAN MILITER I - 06 BANJARMASIN	1
			PENGADILAN MILITER I - 07 BALIKPAPAN	1
			PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA	1
			PENGADILAN MILITER II - 09 BANDUNG	1
			PENGADILAN MILITER II - 10 SEMARANG	1
			PENGADILAN MILITER II - 11 YOGYAKARTA	1
			PENGADILAN MILITER III - 12 SURABAYA	1
			PENGADILAN MILITER III - 13 MADIUN	1
			PENGADILAN MILITER III - 14 DENPASAR	1
			PENGADILAN MILITER III - 15 KUPANG	1
			PENGADILAN MILITER III - 16 MAKASSAR	1
			PENGADILAN MILITER III - 17 MANADO	1
			PENGADILAN MILITER III - 18 AMBON	1
			PENGADILAN MILITER III - 19 JAYAPURA	1
			PENGADILAN MILITER TINGGI - I MEDAN	1
			PENGADILAN MILITER TINGGI - II JAKARTA	1
			PENGADILAN MILITER TINGGI - III SURABAYA	1
			PENGADILAN NEGERI AMBON	1
			PENGADILAN NEGERI AMUNTAI	1
			PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR	1
			PENGADILAN NEGERI ATAMBUA	1
			PENGADILAN NEGERI BAJAWA	1
			PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG	1
			PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN	1
			PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH	1
			PENGADILAN NEGERI BANDUNG	1
			PENGADILAN NEGERI BANGIL	1
			PENGADILAN NEGERI BANGKALAN	1
			PENGADILAN NEGERI BANGKINANG	1
			PENGADILAN NEGERI BANGKO	1
			PENGADILAN NEGERI BANJAR	1
			PENGADILAN NEGERI BANJARBARU	1
			PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN	1
			PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA	1
			PENGADILAN NEGERI BANTUL	1
			PENGADILAN NEGERI BANYUMAS	1
			PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI	1
			PENGADILAN NEGERI BARABAI	1
			PENGADILAN NEGERI BATAM	1
			PENGADILAN NEGERI BATANG	1
			PENGADILAN NEGERI BATU LICIN	1
			PENGADILAN NEGERI BAU-BAU	1
			PENGADILAN NEGERI BEKASI	1
			PENGADILAN NEGERI BELOPA	1
			PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG	1
			PENGADILAN NEGERI BENGKULU	1
			PENGADILAN NEGERI BIAK	1
			PENGADILAN NEGERI BINJAI	1
			PENGADILAN NEGERI BINTUHAN	1
			PENGADILAN NEGERI BITUNG	1
			PENGADILAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU	1
			PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE	1
			PENGADILAN NEGERI BLITAR	1
			PENGADILAN NEGERI BLORA	1
			PENGADILAN NEGERI BOBONG	1
			PENGADILAN NEGERI BOGOR	1
			PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO	1
			PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO	1
			PENGADILAN NEGERI BOYOLALI	1
			PENGADILAN NEGERI BREBES	1
			PENGADILAN NEGERI BUKIT TINGGI	1
			PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA	1
			PENGADILAN NEGERI BUNTOK	1
			PENGADILAN NEGERI CIAMIS	1
			PENGADILAN NEGERI CIANJUR	1
			PENGADILAN NEGERI CIBADAK	1
			PENGADILAN NEGERI CIBINONG	1
			PENGADILAN NEGERI CIKARANG	1
			PENGADILAN NEGERI CILACAP	1
			PENGADILAN NEGERI CIREBON	1
			PENGADILAN NEGERI CURUP	1
			PENGADILAN NEGERI DATARAN HONIPOP	1
			PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIMOA	1
			PENGADILAN NEGERI DEMAK	1

NO	JABATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER JABATAN	PENEMPATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER UNIT KERJA
1	2	3	5	4
			PENGADILAN NEGERI DENPASAR	1
			PENGADILAN NEGERI DEPOK	1
			PENGADILAN NEGERI DOBO	1
			PENGADILAN NEGERI DUMAI	1
			PENGADILAN NEGERI ENDE	1
			PENGADILAN NEGERI ENREKANG	1
			PENGADILAN NEGERI FAK-FAK	1
			PENGADILAN NEGERI GARUT	1
			PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN	1
			PENGADILAN NEGERI GIANYAR	1
			PENGADILAN NEGERI GORONTALO	1
			PENGADILAN NEGERI GRESIK	1
			PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI	1
			PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	1
			PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU	1
			PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT	1
			PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	1
			PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN	1
			PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR	1
			PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA	1
			PENGADILAN NEGERI JAMBI	1
			PENGADILAN NEGERI JAYAPURA	1
			PENGADILAN NEGERI JEMBER	1
			PENGADILAN NEGERI JEPARA	1
			PENGADILAN NEGERI JOMBANG	1
			PENGADILAN NEGERI KAB. KEDIRI	1
			PENGADILAN NEGERI KAB. MADIUN	1
			PENGADILAN NEGERI KABANJAHE	1
			PENGADILAN NEGERI KAIMANA	1
			PENGADILAN NEGERI KALABAHI	1
			PENGADILAN NEGERI KALIANDA	1
			PENGADILAN NEGERI KANDANGAN	1
			PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR	1
			PENGADILAN NEGERI KARAWANG	1
			PENGADILAN NEGERI KASONGAN	1
			PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG	1
			PENGADILAN NEGERI KEBUMEN	1
			PENGADILAN NEGERI KEDIRI	1
			PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU	1
			PENGADILAN NEGERI KENDAL	1
			PENGADILAN NEGERI KENDARI	1
			PENGADILAN NEGERI KEPAHANG	1
			PENGADILAN NEGERI KEPANJEN	1
			PENGADILAN NEGERI KETAPANG	1
			PENGADILAN NEGERI KISARAN	1
			PENGADILAN NEGERI KLATEN	1
			PENGADILAN NEGERI Koba	1
			PENGADILAN NEGERI KOLAKA	1
			PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG	1
			PENGADILAN NEGERI KOTA BARU	1
			PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA	1
			PENGADILAN NEGERI KOTABUMI	1
			PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN	1
			PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	1
			PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	1
			PENGADILAN NEGERI KUDUS	1
			PENGADILAN NEGERI KUNINGAN	1
			PENGADILAN NEGERI KUPANG	1
			PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO	1
			PENGADILAN NEGERI LABUHA	1
			PENGADILAN NEGERI LAHAT	1
			PENGADILAN NEGERI LAMONGAN	1
			PENGADILAN NEGERI LARANTUKA	1
			PENGADILAN NEGERI LASUSUA	1
			PENGADILAN NEGERI LEMBATA	1
			PENGADILAN NEGERI LHOK SEUMAWA	1
			PENGADILAN NEGERI LHOK SUKON	1
			PENGADILAN NEGERI LIMBOTO	1
			PENGADILAN NEGERI LIWA	1
			PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG	1
			PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU	1
			PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM	1
			PENGADILAN NEGERI LUMAJANG	1
			PENGADILAN NEGERI MADIUN	1
			PENGADILAN NEGERI MAGELANG	1
			PENGADILAN NEGERI MAGETAN	1
			PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA	1
			PENGADILAN NEGERI MAKALE	1
			PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	1
			PENGADILAN NEGERI MALANG	1
			PENGADILAN NEGERI MAMUJU	1
			PENGADILAN NEGERI MANADO	1
			PENGADILAN NEGERI MANNA	1
			PENGADILAN NEGERI MANOKWARI	1
			PENGADILAN NEGERI MARABAHAN	1
			PENGADILAN NEGERI MARISA	1
			PENGADILAN NEGERI MAROS	1

NO	JABATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER JABATAN	PENEMPATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER UNIT KERJA
1	2	3	5	4
			PENGADILAN NEGERI MARTAPURA	1
			PENGADILAN NEGERI MASOHI	1
			PENGADILAN NEGERI MATARAM	1
			PENGADILAN NEGERI MAUMERE	1
			PENGADILAN NEGERI MEDAN	1
			PENGADILAN NEGERI MELONGUANE	1
			PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH	1
			PENGADILAN NEGERI MENGGALA	1
			PENGADILAN NEGERI MENTOK	1
			PENGADILAN NEGERI MERAUKE	1
			PENGADILAN NEGERI METRO	1
			PENGADILAN NEGERI MEUREUDU	1
			PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO	1
			PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM	1
			PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH	1
			PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO	1
			PENGADILAN NEGERI MUNGKID	1
			PENGADILAN NEGERI NABIRE	1
			PENGADILAN NEGERI NAMLEA	1
			PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	1
			PENGADILAN NEGERI NGABANG	1
			PENGADILAN NEGERI NGANJUK	1
			PENGADILAN NEGERI NGAWI	1
			PENGADILAN NEGERI OELAMASI	1
			PENGADILAN NEGERI PACITAN	1
			PENGADILAN NEGERI PADANG	1
			PENGADILAN NEGERI PADANG SIDEMPUAN	1
			PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM	1
			PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	1
			PENGADILAN NEGERI PALEMBANG	1
			PENGADILAN NEGERI PALOPO	1
			PENGADILAN NEGERI PALU	1
			PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN	1
			PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG	1
			PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE	1
			PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG	1
			PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	1
			PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	1
			PENGADILAN NEGERI PARIAMAN	1
			PENGADILAN NEGERI PARIGI	1
			PENGADILAN NEGERI PARINGIN	1
			PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU	1
			PENGADILAN NEGERI PASURUAN	1
			PENGADILAN NEGERI PATI	1
			PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN	1
			PENGADILAN NEGERI PEKANBARU	1
			PENGADILAN NEGERI PELAIHARI	1
			PENGADILAN NEGERI PELALAWAN	1
			PENGADILAN NEGERI PEMALANG	1
			PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR	1
			PENGADILAN NEGERI PENAJAM	1
			PENGADILAN NEGERI POLEWALI	1
			PENGADILAN NEGERI PONOROGO	1
			PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	1
			PENGADILAN NEGERI POSO	1
			PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH	1
			PENGADILAN NEGERI PRAYA	1
			PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO	1
			PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	1
			PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG	1
			PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA	1
			PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA	1
			PENGADILAN NEGERI PURWODADI	1
			PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO	1
			PENGADILAN NEGERI PURWOREJO	1
			PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU	1
			PENGADILAN NEGERI RABA BIMA	1
			PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG	1
			PENGADILAN NEGERI RANTAU	1
			PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT	1
			PENGADILAN NEGERI REMBANG	1
			PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO	1
			PENGADILAN NEGERI RUTENG	1
			PENGADILAN NEGERI SALATIGA	1
			PENGADILAN NEGERI SAMARINDA	1
			PENGADILAN NEGERI SAMBAS	1
			PENGADILAN NEGERI SAMPANG	1
			PENGADILAN NEGERI SAMPIT	1
			PENGADILAN NEGERI SANANA	1
			PENGADILAN NEGERI SANGGAU	1
			PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI	1
			PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH	1
			PENGADILAN NEGERI SEKAYU	1
			PENGADILAN NEGERI SELONG	1
			PENGADILAN NEGERI SEMARANG	1
			PENGADILAN NEGERI SENGKANG	1
			PENGADILAN NEGERI SERANG	1

NO	JABATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER JABATAN	PENEMPATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER UNIT KERJA
1	2	3	5	4
			PENGADILAN NEGERI SERUI	1
			PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN	1
			PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG	1
			PENGADILAN NEGERI SIDOARJO	1
			PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN	1
			PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG	1
			PENGADILAN NEGERI SINGARAJA	1
			PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG	1
			PENGADILAN NEGERI SINTANG	1
			PENGADILAN NEGERI SITUBONDO	1
			PENGADILAN NEGERI SLAWI	1
			PENGADILAN NEGERI SLEMAN	1
			PENGADILAN NEGERI SO'E	1
			PENGADILAN NEGERI SOA SIO	1
			PENGADILAN NEGERI SORONG	1
			PENGADILAN NEGERI SRAGEN	1
			PENGADILAN NEGERI STABAT	1
			PENGADILAN NEGERI SUBANG	1
			PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE	1
			PENGADILAN NEGERI SUKABUMI	1
			PENGADILAN NEGERI SUKADANA	1
			PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO	1
			PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR	1
			PENGADILAN NEGERI SUMBER (CIREBON)	1
			PENGADILAN NEGERI SUMEDANG	1
			PENGADILAN NEGERI SUMENEP	1
			PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT	1
			PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	1
			PENGADILAN NEGERI SURABAYA	1
			PENGADILAN NEGERI SURAKARTA	1
			PENGADILAN NEGERI TABANAN	1
			PENGADILAN NEGERI TAIS	1
			PENGADILAN NEGERI TAKENGON	1
			PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	1
			PENGADILAN NEGERI TANGERANG	1
			PENGADILAN NEGERI TANJUNG	1
			PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR	1
			PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN	1
			PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG	1
			PENGADILAN NEGERI TANJUNG SELOR	1
			PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG	1
			PENGADILAN NEGERI TARAMONAN	1
			PENGADILAN NEGERI TARAKAN	1
			PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA	1
			PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI	1
			PENGADILAN NEGERI TEBO	1
			PENGADILAN NEGERI TEGAL	1
			PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN	1
			PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG	1
			PENGADILAN NEGERI TENGGARONG	1
			PENGADILAN NEGERI TERNATE	1
			PENGADILAN NEGERI TOBELO	1
			PENGADILAN NEGERI TONDANO	1
			PENGADILAN NEGERI TONGGAL	1
			PENGADILAN NEGERI TUAL	1
			PENGADILAN NEGERI TUBAN	1
			PENGADILAN NEGERI TUBEI	1
			PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG	1
			PENGADILAN NEGERI UNGARAN	1
			PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK	1
			PENGADILAN NEGERI WAINGAPU	1
			PENGADILAN NEGERI WAMENA	1
			PENGADILAN NEGERI WANGIWANGI	1
			PENGADILAN NEGERI WATAMPONE	1
			PENGADILAN NEGERI WATES	1
			PENGADILAN NEGERI WONOGIRI	1
			PENGADILAN NEGERI WONOSARI	1
			PENGADILAN NEGERI WONOSOBO	1
			PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	1
			PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON	1
			PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG	1
			PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	1
			PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO	1
			PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA	1
			PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA	1
			PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI	1
			PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG	1
			PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR	1
			PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO	1
			PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM	1
			PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA	1
			PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	1
			PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK	1
			PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA	1
			PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG	1
			PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG	1
			PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA	1
			PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG	1

NO	JABATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER JABATAN	PENEMPATAN	PENETAPAN KEBUTUHAN PER UNIT KERJA
1	2	3	5	4
			PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA	1
			MAHKAMAH SYARIAH ACEH	1
			PENGADILAN MILITER UTAMA	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA TERNATE	1
			PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA	1
			PENGADILAN TINGGI AMBON	1
			PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	1
			PENGADILAN TINGGI BANDUNG	1
			PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	1
			PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN	1
			PENGADILAN TINGGI BANTEN	1
			PENGADILAN TINGGI BENGKULU	1
			PENGADILAN TINGGI DENPASAR	1
			PENGADILAN TINGGI GORONTALO	1
			PENGADILAN TINGGI JAKARTA	1
			PENGADILAN TINGGI JAMBI	1
			PENGADILAN TINGGI JAYAPURA	1
			PENGADILAN TINGGI KENDARI	1
			PENGADILAN TINGGI KUPANG	1
			PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	1
			PENGADILAN TINGGI MANADO	1
			PENGADILAN TINGGI MATARAM	1
			PENGADILAN TINGGI MEDAN	1
			PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	1
			PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	1
			PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	1
			PENGADILAN TINGGI SAMARINDA	1
			PENGADILAN TINGGI SEMARANG	1
			PENGADILAN TINGGI SURABAYA	1
			PENGADILAN TINGGI TANJUNGPUR	1
			PENGADILAN TINGGI TANJUNGPUR	1
			PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA	1
			PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR	1
			PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN	1
			PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA	1
			PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA	1
	TOTAL	921		921

(kota), (tanggal) (bulan) 2022

Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI
di
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat /Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan : S-2 / S-1 / D III (Jurusan / Prodi) *
IPK : 0.00 (nol titik nol nol)
Jabatan yang dilamar :
Alamat :
Nomor *Handphone* :
e-mail :

dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Pegawai Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2022. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan dokumen yang telah diunggah sebagai berikut:

1. Scan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau Surat Keterangan telah melakukan Rekaman Kependudukan dari Dukcapil;
2. Scan Asli Ijazah dan Transkrip Nilai;
3. Scan Asli Surat Keterangan pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun;
4. Scan Asli Dokumen Persyaratan Khusus (bagi jabatan yang mempersyaratkan dan penyandang disabilitas).

Demikian surat lamaran ini dibuat, adapun seluruh data dan dokumen yang saya unggah adalah benar. Apabila di kemudian hari ditemukan data dan dokumen yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi PPPK Tenaga Teknis Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2022.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Meterai
Rp. 10.000,-

(nama lengkap)

*)pilih salah satu

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

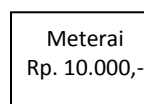
Nama :
Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
Alamat (sesuai KTP) :
Pekerjaan pada KTP :
Jenjang pendidikan :
Program studi/Jurusan :
Jabatan yang dilamar :

Merupakan Pelamar Pegawai Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis pada Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2022, menyatakan:

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan Badan Peradilan yang berada di bawahnya di seluruh Indonesia;
8. Tidak akan mengajukan permohonan pindah ke instansi lain;
9. Berpengalaman minimal 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan;
10. Bersedia membayar ganti rugi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jika di kemudian hari saya mengundurkan diri setelah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK.

Demikian pernyataan ini dibuat, apabila terbukti tidak benar, maka saya bersedia digugurkan atau dibatalkan kelulusan pada Seleksi PPPK Tenaga Teknis Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2022.

Yang menyatakan,



(nama peserta)

Catatan:

Nomor 1 s.d. 10 wajib tercantum dalam surat pernyataan, apabila ada pernyataan yang tidak termuat atau diganti maka dianggap tidak sah dan digugurkan.